

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

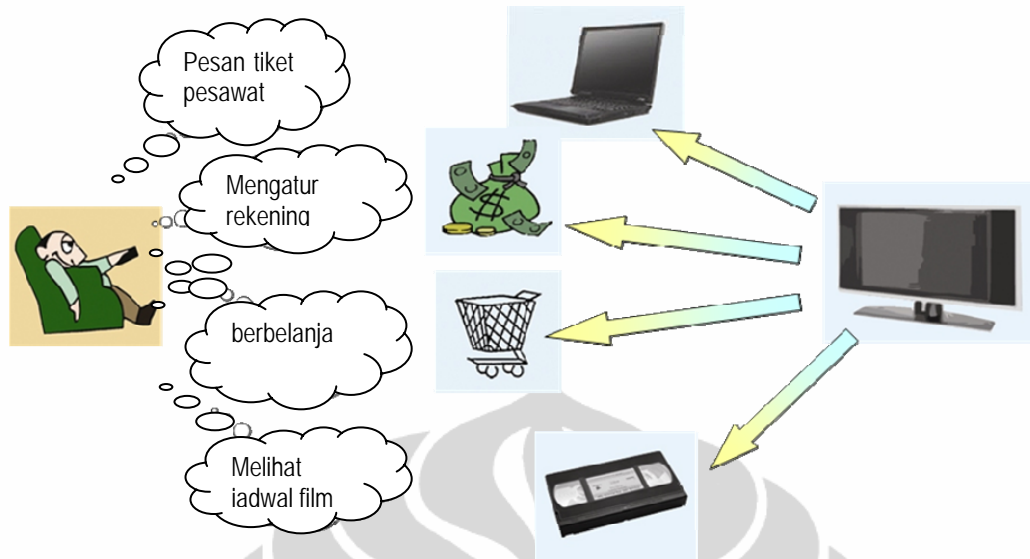
Dari perkembangan siaran TV (Televisi) di Indonesia diperoleh bahwa TV merupakan suatu media informasi yang sangat strategis dan efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dapat berperan dalam pembangunan, memajukan ekonomi negara.

Perkembangan teknologi informasi di dunia berkembang begitu pesat, perkembangan yang diawali oleh teknologi analog berkembang menjadi teknologi digital termasuk televisi siaran yang menjadi TV Digital. Siaran TV digital menjanjikan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemirsanya dibandingkan dengan siaran TV analog. Manfaat tersebut meliputi kualitas gambar yang lebih baik, program siaran yang lebih banyak dan bervariasi serta penerimaan yang lebih jelas walaupun pada saat bergerak (*mobile*).

Dengan adanya teknologi TV digital juga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat khususnya bagi yang ingin mendirikan lembaga penyiaran swasta. Dengan banyaknya program siaran yang bisa disalurkan menjadikan penggunaan frekuensi menjadi efisien dan efektif. Sehingga banyaknya pemohon pendirian lembaga penyiaran swasta pada saat ini yang terkendala masalah keterbatasan frekuensi menjadi bisa terselesaikan.

Selain itu TV digital memberikan fleksibilitas aplikasi-aplikasi yang bisa bersifat interaktif dibanding TV analog. Sehingga dengan semakin cepatnya perkembangan TV digital di suatu wilayah, akan sangat membantu mempercepat kebutuhan interaksi antara suatu perusahaan (*enterprise*) dengan penggunaannya baik yang bersifat komersial seperti pengiklanan interaktif (*interactive advertisement*), berita jarak jauh (*tele-news*), perbankan jarak jauh (*tele-banking*), belanja jarak jauh (*tele shopping*), maupun non komersial seperti pendidikan jarak jauh (*tele-education*), informasi trafik jarak jauh (*tele-traffic*).

Siaran TV akan menjadi media yang sangat strategis mendistribusikan layanannya. Layanan interaktif TV digital ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



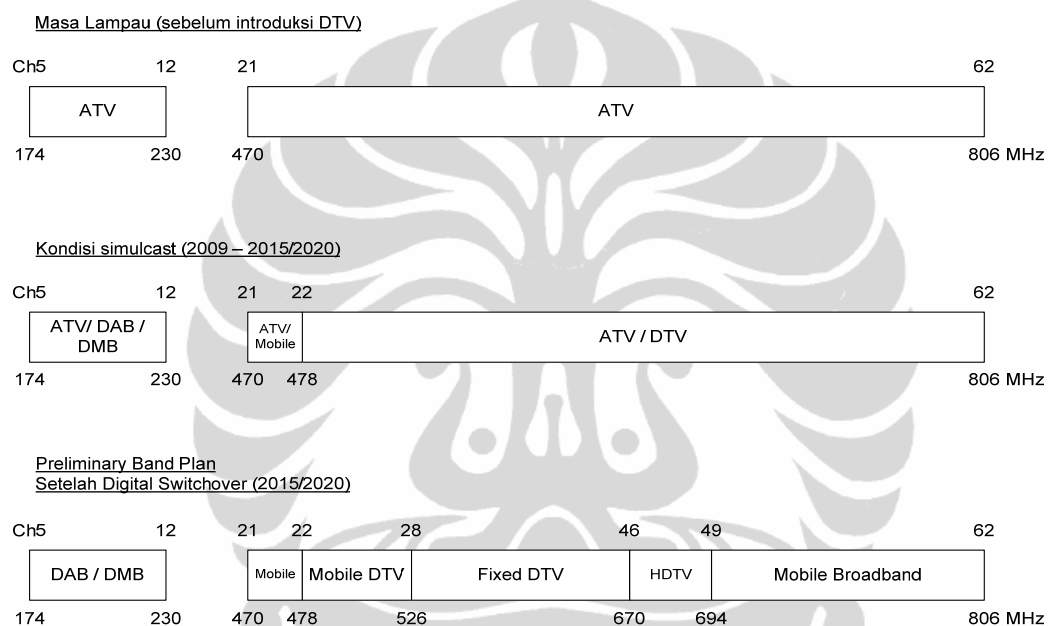
Gambar 1.1 Layanan Interaktif TV digital[1]

Perkembangan sistem penyiaran TV digital di Amerika, Jepang dan Eropa sudah dimulai beberapa tahun lalu. Bahkan di Amerika telah memberikan mandat akan menghentikan siaran TV analognya secara total (*cut-off*) di tahun 2009, begitu pula Jepang di tahun 2011, dan negara-negara Eropa dan kawasan Asia juga akan mengikuti migrasi total dari sistem analog ke sistem digital. Di Singapura, TV digital telah diluncurkan sejak Agustus 2004. Di Malaysia pembangunan TV digital juga dirintis sejak 1998, dan mulai dioperasikan pada tahun 2006.[2]

Perubahan dari sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran digital merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena terdapat suatu kesepakatan banyak negara, bahwa pada suatu saat nanti, semua sinyal TV Analog akan dihentikan, dan digantikan oleh sinyal TV Digital. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah “*Analog Switched Off (ASO)*”.

Digital Dividend merupakan spektrum hasil dari peninggalan terjadinya migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (“*Digital Switchover*”). Dimana Indonesia diprediksi akan menjalani proses ini secara penuh setelah tahun 2015 secara nasional[2].

Peninggalan spektrum frekuensi televisi analog mempunyai nilai teknoekonomis yang tinggi dikarenakan spektrum tersebut berada di antara 200 MHz – 1 GHz. Spektrum frekuensi radio di pita UHF (*band IV dan V*) yang direncanakan digunakan untuk TV digital teresterial adalah spektrum frekuensi radio yang bernilai tinggi karena merupakan optimasi antara kebutuhan cakupan (propagasi) dan *bandwidth*. Dalam gambar 1.2 dibawah ini dijelaskan perencanaan spektrum frekuensi sebelum terjadinya migrasi dari TV analog ke TV digital maupun setelah terjadinya migrasi.



Gambar 1.2 Perencanaan Frekuensi di Indonesia setelah ASO[3]

Dengan adanya teknologi penyiaran digital yang didukung oleh kemampuan cakupan propagasi dan bandwidth yang bagus di *band UHF* diharapkan akan menjadikan biaya investasi yang dikeluarkan akan menjadi semakin efisien.

Disamping itu dengan adanya fitur SFN (*Single Frekuensi Network*) yang memungkinkan sebuah operator memperluas area cakupannya dengan memasang sejumlah stasiun pemancar yang tersebar pada wilayah layanan yang luas. Namun semuanya beroperasi pada kanal frekuensi yang sama, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelanggannya tanpa memerlukan lebih dari satu kanal.

Dengan demikian dengan adanya sistem penyiaran televisi digital akan banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah sebagai regulator karena pemanfaatan spektrum frekuensi bisa efektif dan efisien.

Dengan konsep sistem penyiaran digital dimana satu kanal frekuensi TV dapat menyalurkan 4-6 program siaran, maka dapat berbagi (sharing) kanal frekuensi antara penyelenggara TV[2]. Pemerintah dalam rencananya akan merubah model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dengan memisahkan antara penyelenggara program (*content provider*) dan penyelenggara jaringan (*network provider*) yang selama ini belum diterapkan pada sistem perizinan penyiaran analog.

Dengan demikian dengan adanya proses migrasi dari analog ke digital diperlukan adanya model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi pada TV siaran digital.

Di Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Pemerintah, setiap pengguna frekuensi radio diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi termasuk untuk penyelenggara TV siaran.

Pemerintah sebagai regulator yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi (*spectrum management*) harus didukung oleh dana yang memadai di dalam melaksanakan seluruh kegiatannya. Penerapan BHP frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum[4].

Pada saat ini BHP untuk penyelenggara TV siaran Analog menggunakan model yang mengacu pada PP No 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Depkominfo.

Dengan adanya perubahan Model bisnis di industri TV penyiaran maka BHP akan dibebankan kepada Operator Multiplex sehingga diperlukan model BHP baru. Disamping itu ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait dengan formula yang diterapkan pada saat ini, diantaranya adalah formula belum memperhatikan faktor jumlah populasi dan kondisi ekonomi di wilayah layanan TV.

Dengan demikian adanya model baru BHP televisi digital dimasa mendatang akan memperhatikan faktor – faktor kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk.

1.2. Perumusan Permasalahan

Model BHP frekuensi eksisting dalam perhitungannya masih menggunakan basis lokasi pemancar dan daya pancarannya. Sehingga BHP yang dikenakan antara wilayah layanan kurang adil, karena tidak memperhatikan faktor cakupan populasi dan kondisi ekonomi di wilayah layanan siaran. Kekurangan penggunaan Cakupan daya pancar adalah tidak mencerminkan cakupan populasi, dengan daya pancar yang sama belum tentu mempunyai cakupan populasi yang sama. Populasi adalah faktor penting dalam dunia penyiaran karena menyangkut potensi pemirsa TV dan berpengaruh pada pendapatan iklan. Demikian juga dengan faktor kondisi ekonomi di wilayah layanan siaran antara daerah ekonomi yang maju dengan kurang maju perlu ada perbedaan dalam pembayaran BHP frekuensi. Sehingga dengan merivisi model BHP eksisting dengan menambahkan faktor populasi dan kondisi ekonomi wilayah layanan diharapkan akan memberi keadilan dalam pembayaran BHP frekuensi siaran TV.

Dengan adanya migrasi dari TV analog ke TV digital maka secara teknoekonomis akan memberikan keuntungan kepada pemerintah dan masyarakat. Indonesia akan diprediksikan akan menyelenggarakan sistem TV digital *terrestrial* tetap secara penuh pada tahun 2015[2]. Maka peristiwa tersebut menjadi momentum untuk membuat model BHP baru sekaligus merivisi model BHP eksisting .

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memodelkan BHP baru yang dengan menjadikan momentum adanya migrasi sistem TV analog ke TV digital. Sekaligus merivisi model BHP TV siaran eksisting yang kurang adil dengan memperhatikan faktor populasi dan kondisi ekonomi di wilayah layanan.

1.4. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan tidak terlalu meluas. Berikut adalah batasan-batasan yang diberikan oleh penulis:

- a. Penelitian dikhususkan pada perhitungan Biaya Spektrum pada Layanan TV siaran bukan pada layanan yang lain seperti telekomunikasi seluler dll.
- b. Penelitian dikhususkan pada perhitungan Biaya BHP Televisi Digital *Terrestrial Tetap (Free To Air)* pada Lembaga Penyiaran Swasta setelah adanya *(Analog Swich off)* di Indonesia yang akan direncanakan terjadi pada tahun 2014-2018.
- c. Simulasi perhitungan BHP TV siaran digital didasarkan Wilayah layanan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 76 Tahun 2003 Tentang Masterplan TV Penyelenggaraan TV siaran di Indonesia dengan membandingkan beberapa wilayah layanan
- d. Simulasi perhitungan menggunakan asumsi bahwa seluruh TV *house hold* sudah mempunyai *setup box* setelah adanya migrasi penuh setelah tahun 2015, sehingga tidak lagi memperhitungkan faktor penetrasi *setup box* di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini dibagi dalam empat (5) tahapan penulisan yaitu

Bab 1. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Kondisi Penyiaran ,Teknologi TV digital dan Regulasi BHP Frekuensi

Menjelaskan tentang kondisi dan regulasi penyiaran di Indonesia, penerapan teknologi penyiaran digital dan regulasi BHP Frekuensi di Indonesia

Bab 3. Biaya Spektrum

Menjelaskan Prinsip Biaya Sepktrum, metode untuk menghitung biaya spektrum dan contoh di beberapa negara

Bab 4. Model Perhitungan BHP Penyiaran Digital di Indonesia

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai usulan model perhitungan BHP frekuensi yang akan digunakan di Indonesia dan melakukan simulasi perhitungan di beberapa wilayah layanan

Bab 5. Kesimpulan

